

ANALISIS GINI RATIO KABUPATEN DELI SERDANG 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

STATISTIK

ANALISIS GINI RATIO KABUPATEN DELI SERDANG 2016



ANALISIS GINI RATIO KABUPATEN DELI SERDANG 2016

ISBN : 978-602-6374-49-3
Katalog : 3206003.1212
Nomor Publikasi : 12120.1708
Ukuran Buku : 21 X 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 34 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Dicetak Oleh :

CV Rilis Grafika

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Publikasi “Analisis Gini Ratio Kabupaten Deli Serdang 2016” merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dalam usaha memenuhi permintaan data dari konsumen baik dari pemerintah maupun swasta.

Publikasi ini merupakan hasil pengumpulan data melalui kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) melalui Daftar VSEN.KP yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan dirancang untuk menghasilkan data konsumsi/pengeluaran makanan dan bukan makanan rumah tangga.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, sehingga terbitnya publikasi ini. Penyajian dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini selanjutnya.

Akhir kata semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Lubuk Pakam, September 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang



Ir. Tuti Hidayati, M.Si
NIP. 19661211 199401 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	lii
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	Vii
DAFTAR GAMBAR.....	Ix
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KONSEP DAN METODOLOGI.....	7
2.1 Kajian Teori.....	9
2.2 Definisi Variabel.....	10
2.3 Pendekatan Penghitungan Ketimpangan Pendapatan.....	11
2.4 Sumber Data.....	14
III. PEMBAHASAN.....	15
3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2016.....	17
3.2 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2016.....	18
3.3 Pola Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2016.....	20
3.4 Pola Pergerakan Koefisien Gini Tahun 2013 – 2016.....	25
3.5 Kriteria Bank Dunia.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel	A1	PDRB per Kapita Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2013 – 2016 (Rupiah).....	19
Tabel	A2	Persentase Pengeluaran Rata – rata per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran yang Mengalami Penurunan di Kabupaten Deli Serdang Sejak Tahun 2013 – 2016	22
Tabel	A3	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Aneka Barang dan Jasa di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2016.....	25
Tabel	A4	Peringkat Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2016.....	26
Tabel	A5	Distribusi Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2016 Menurut Kriteria Bank Dunia.....	27
Tabel	1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2016 (Milyar Rupiah).....	31
Tabel	2	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2016.....	32
Tabel	3	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Bukan Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2016.....	33
Tabel	4	Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2016.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz.....	12
Gambar	2	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang dan Sumatera Utara Tahun 2013 – 2016.....	17
Gambar	3	Persentase Rata - rata Konsumsi per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2016.....	21
Gambar	4	Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran yang Mengalami Penurunan Dari Tahun 2015 - 2016 di Kabupaten Deli Serdang	23
Gambar	5	Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Menurut Komoditi Pengeluaran di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

<http://deliserdang.go.id>

Makna dari pembangunan nasional adalah agar dapat meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa serta negara yang merupakan proses pengembangan dalam keseluruhan dari sistem penyelenggaraan negara agar dapat mewujudkan tujuan nasional itu sendiri. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian agar pembangunan saling berkesinambungan serta meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara supaya dapat melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan nasional.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil evaluasi pembangunan. Pencapaian serta evaluasi hasil-hasil pembangunan saat ini menjadi pembahasan utama di berbagai wilayah Indonesia. Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memberi alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan, terutama perubahan kebijakan pembangunan ekonomi.

Sebagai suatu proses, maka pembangunan ekonomi mempunyai kaitan dan pengaruh antara faktor-faktor di dalamnya yang dapat menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut. Selanjutnya pembangunan ekonomi akan tercermin pada kenaikan pendapatan per kapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu keberhasilan usaha negara tersebut untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata serta dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di negara tersebut.

Salah satu cerminan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan riil per kapita penduduk. Agar pendapatan perkapita riil penduduk terus meningkat, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat dapat didorong dengan peningkatan atau penambahan faktor produksi modal (*capital*).

Namun perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini muncul karena untuk



mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penambahan kapital akan lebih berperan dari pada penambahan tenaga kerja. Proporsi faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap balas jasa yang akan diterima oleh masing-masing faktor produksi tersebut.

Untuk itu, setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu untuk dapat mengusulkan perubahan paradigma yang lebih difokuskan hal-hal yang terkait kesejahteraan masyarakat dan distribusi guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Hal ini terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana suatu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, Perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.

Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Pembangunan daerah yang tidak memfokuskan pada masalah kemiskinan hanya akan menciptakan kemakmuran bagi



golongan tertentu saja. Sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi angka kemiskinan hingga saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Salah satu bentuk upaya tersebut dijabarkan dalam misi pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu “ Mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas – luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif, dan menghormati hak azasi manusia”.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wilayah sangat luas terdiri dari 22 kecamatan dengan sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi penduduk yang berbeda, serta memiliki topologi wilayah yang cukup beragam. Keadaan ini menimbulkan perbedaan kecepatan pembangunan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Masalah kemiskinan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun perekonomian Kabupaten Deli Serdang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, tetapi distribusi pendapatan tetap bisa diabaikan. Perekonomian Kabupaten Deli Serdang secara umum masih ditopang oleh sektor industri dan sebagian sektor pertanian. Ketimpangan ekonomi pada umumnya muncul apabila hasil pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh para pemilik modal atau golongan tertentu.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian untuk dapat melihat tingkat kesenjangan baik dilihat sisi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Sedangkan PDRB per kapita sebagai pendekatan pendapatan per kapita dapat digunakan untuk melihat ketimpangan antar wilayah.



BAB II
KONSEP DAN
METODOLOGI

<http://elisa.mngka0.bps.go.id>

1.1. Kajian Teori

Disamping peningkatan pendapatan, pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan. Secara logika, semakin besar jurang pemisah (*gap*) antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tetapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

Dimana ;

A = Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X,

N = Jumlah penduduk total,

b = Parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Pengukuran tingkat pemerataan pendapatan sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk



mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah *Gini Coefficient* yang dibantu dengan menggunakan *Kurva Lorentz*.

Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam analisis ini akan digunakan tiga ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu: Koefisien Gini (*Gini Ratio*), kurva Lorentz dan Ukuran Bank Dunia.

1.2. Definisi Variabel

Berikut konsep dan defenisi variabel yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

- a) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur dan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi.
- b) **PDRB per kapita atas dasar harga berlaku** adalah gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi pada tahun yang berlaku. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku biasanya digunakan untuk menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
- c) **Konsumsi** adalah tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Atau dengan definisi lain yaitu pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam dalam jangka waktu tertentu. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi



makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan, selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

- d) **Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

1.3. Pendekatan Penghitungan Ketimpangan Pendapatan

A. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i x (F c_i + F c_{i-1})$$

Dimana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

f_{p_i} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-*i*

F_{c_i} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-*i*

F_{c_{i-1}} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (*i-1*)

Nilai Koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Koefisien Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan juga semakin tinggi. Bila nilai Koefisien Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Begitu juga yang terjadi sebaliknya. Untuk publikasi resmi BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun Koefisien Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran. Menurut Todaro (1981) angka Koefisien Gini untuk negara-negara sedang berkembang dinyatakan bahwa distribusi

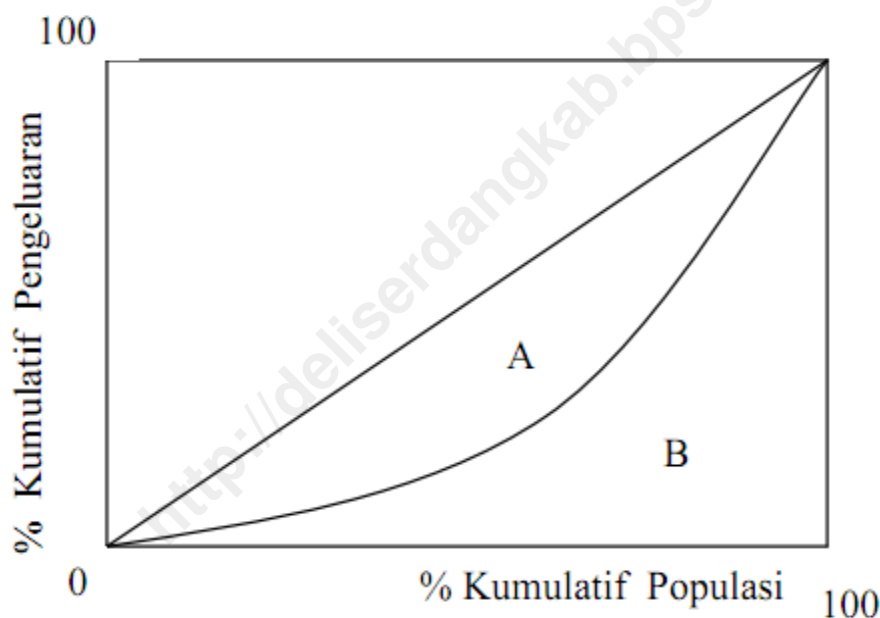


pendapatan sangat timpang jika angka gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif sama ketimpangannya jika nilaiya antara 0,2 sampai 0,3.

B. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

Selain itu, tingkat ketimpangan dapat diukur juga melalui *personal income* dengan menggunakan Kurva Lorenz, yaitu yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase populasi penerima pendapatan dengan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz



Pada Gambar 1. tersebut sumbu horizontal mewakili jumlah populasi penerima pendapatan dan sumbu vertikal menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase penduduk (Todaro, 1981). Garis Kurva Lorenz akan berada di atas garis horisontal, bila kurva tersebut menjauh dari kurva diagonal maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif



penduduk. Untuk membentuk Koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ Koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ Koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut:

- ❖ Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,3$
- ❖ Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,3 - 0,5$
- ❖ Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

C. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen maka dikategorikan memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen maka dikategorikan memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah.

-
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen maka dikategorikan memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

1.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan untuk melengkapi digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB.

<http://deliserdangkab.bps.go.id>



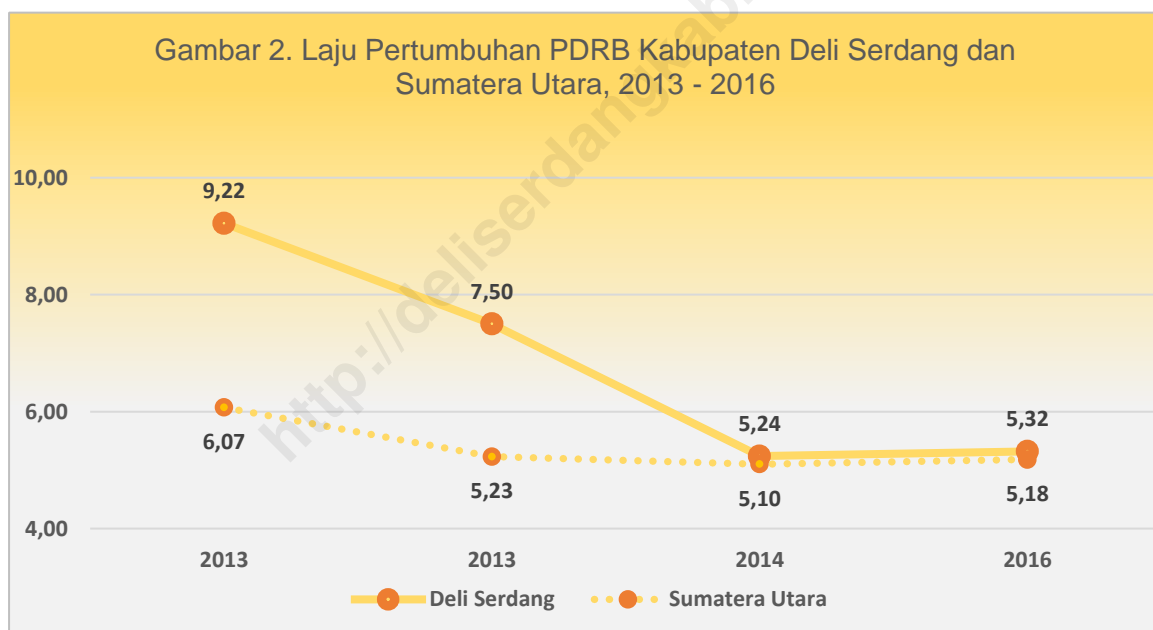
BAB III

PEMBAHASAN

<http://deliserdangkab.go.id>

1.5. Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2016

Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari dari konstribusinya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 menyumbangkan sekitar 13,55 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara dan merupakan penyumbang terbesar kedua setelah Kota Medan. Sementara itu, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 31,92 persen. Kondisi ini didukung karena Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa sentra industri yaitu di Kecamatan Sunggal, Tanjung Morawa (Kawasan Industri Medan Star) dan Percut Sei Tuan (Kawasan Industri Medan-2). Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor penyumbang terbesar untuk PDRB Kabupaten Deli Serdang. Selain sektor industri pengolahan, penyumbang terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor yaitu 16,54 persen.



Perekonomian Kabupaten Deli Serdang selama empat tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan ekonomi. Dimana pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 9,22 persen, sedangkan tahun 2016 hanya sebesar 5,32 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami pola relatif yang sama. Sejak tahun 2013 sampai 2015 terus mengalami perlambatan ekonomi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kembali meningkat meskipun tidak terlalu signifikan yaitu hanya dibawah 0,1 persen. Peningkatan pembangunan ekonomi diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pendapatan dan lapangan kerja. Hal ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dan membantu peningkatan penciptaan nilai tambah ekonomi.

1.6. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2016

Data pendapatan rumah tangga per kapita untuk masih belum tersedia, oleh karena itu pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah umumnya didekati dengan dua pendekatan (*proxy*) pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pengeluaran konsumsi per kapita. Walaupun kedua nilai tersebut tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk sebagai indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Tingkat pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, jadi wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB per kapita yang tinggi apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat besar.



Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar pendapatan yang masuk ke Kabupaten Deli Serdang (*Net Factor Income From Abroad*). Sehingga pendapatan perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar-masuk Kabupaten Deli Serdang tersebut, menyebabkan PDRB perkapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Tabel A1. PDRB Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2013 – 2016 (Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)
2013	31 472 213,97	26 748 024,30
2014	35 071 929,41	28 113 375,66
2015	37 813 697,53	28 937 186,78
2016	41.086 202,19	29 837 900,25

Berdasarkan penghitungan atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 mencapai 41,09 juta rupiah. Walaupun angka ini masih belum dikurangi dengan pendapatan yang keluar dan masuk Deli Serdang, namun telah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Begitu juga halnya dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang terus meningkat sampai dengan tahun 2016 hingga mencapai 29,84 juta rupiah.

1.7. Pola Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2016

Secara makro ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Kebanyakan negara pengeluaran untuk konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Selain itu, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari antar waktu

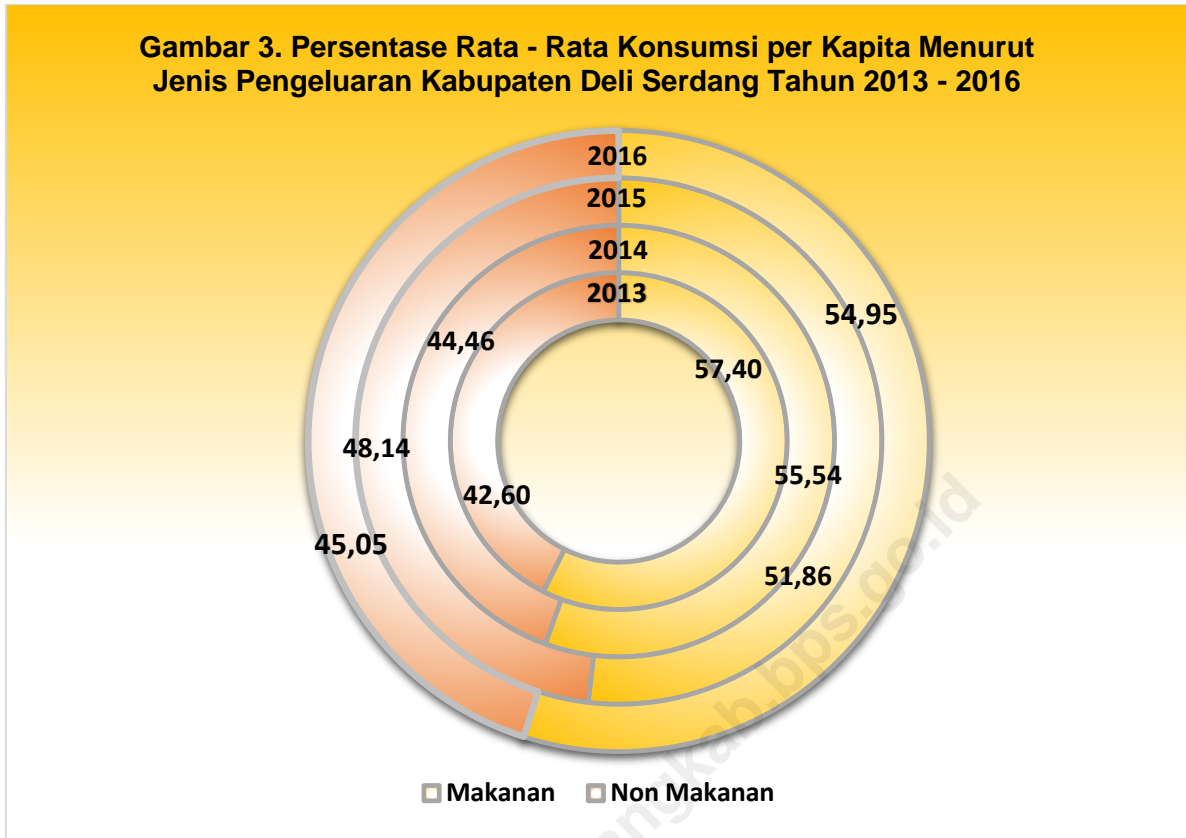
Konsumsi untuk makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola komposisi konsumsi, yaitu penurunan porsi yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Pergeseran pola komposisi konsumsi terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum masih rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan atau diinvestasikan.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2013 sampai 2016 mengalami perubahan meskipun tidak terlalu besar. Terlihat pada tahun 2013 pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 57,40 persen dan bukan makanan sebesar 42,60 persen. Persentase pengeluaran untuk makanan turun pada tahun 2013 menjadi 42,60 persen dan sisanya bukan makanan. Hal ini dikarenakan ada beberapa komoditi yang pengeluarannya mengalami kenaikan. Sementara itu mulai tahun 2014 sampai tahun 2015 pengeluaran konsumsi makanan per kapita terus menurun menjadi 51,86 persen. Sedangkan pengeluaran konsumsi bukan makanan per kapita bergerak sebaliknya hingga mencapai 48,14 persen pada tahun 2015.



Gambar 3. Persentase Rata - Rata Konsumsi per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2016



A. Konsumsi Makanan

Selama kurun waktu dua tahun terakhir terjadi pergeseran pola konsumsi kelompok makanan dan non makanan. Pada tahun 2014 persentase pengeluaran per kapita untuk konsumsi kelompok makanan sebesar 51,86 meningkat menjadi 54,95 persen pada tahun 2016. Meningkatnya persentase pengeluaran kelompok makanan terjadi karena adanya peningkatan konsumsi untuk komoditi umbi-umbian, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, buah-buahan, bahan minuman, makanan dan minuman jadi serta rokok seperti terlihat pada Table A2.

Tabel A2. Persentase Pengeluaran Rata – rata per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran yang Mengalami Penurunan di Kabupaten Deli Serdang Sejak Tahun 2013 – 2016

Jenis Komoditi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Umbi-umbian	0,47	0,58
Daging	0,32	1,95
Telur dan Susu	3,59	3,60
Sayur-sayuran	4,23	5,39
Buah-buahan	1,89	2,04
Bahan minuman	1,68	1,69
Makanan dan minuman jadi	11,36	11,95
Rokok	8,62	8,76

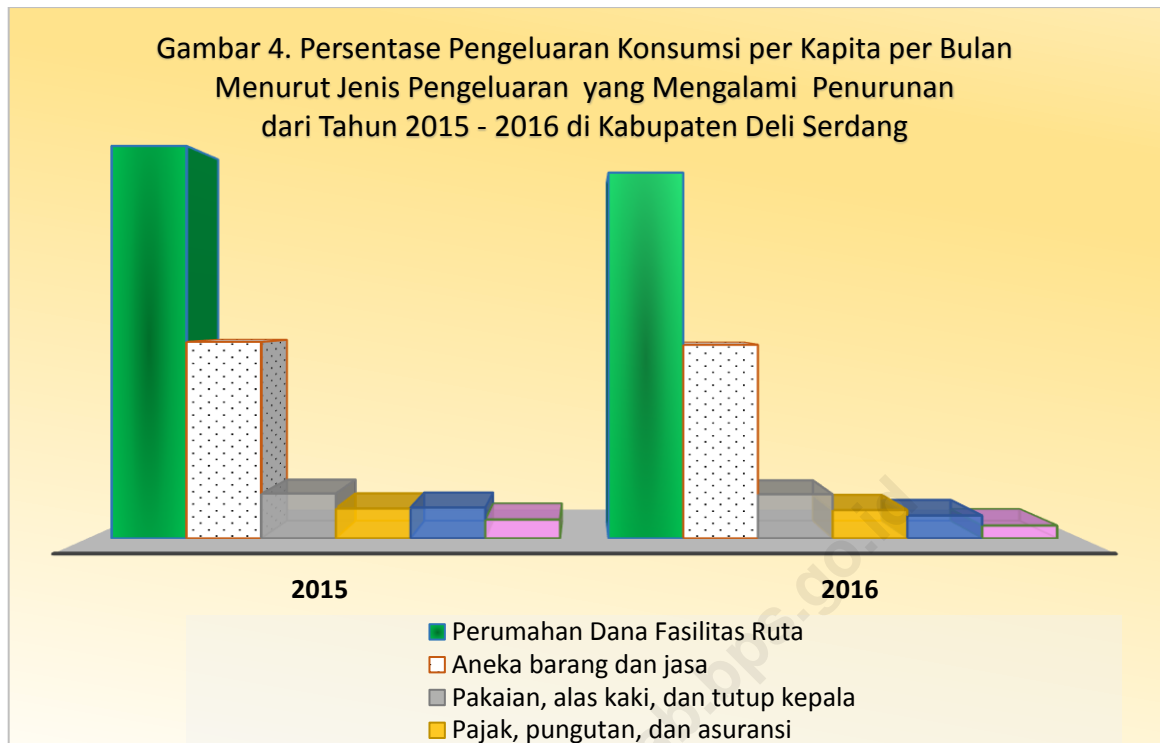
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2015-2016

Persentase pengeluaran konsumsi per kapita per bulan pada tahun 2016 yang mengalami penurunan adalah komoditi padi-padian, ikan/udang/cumi/kerang, minyak dan kelapa, bumbu-bumbuan, dan rokok.

B. Konsumsi Non Makanan

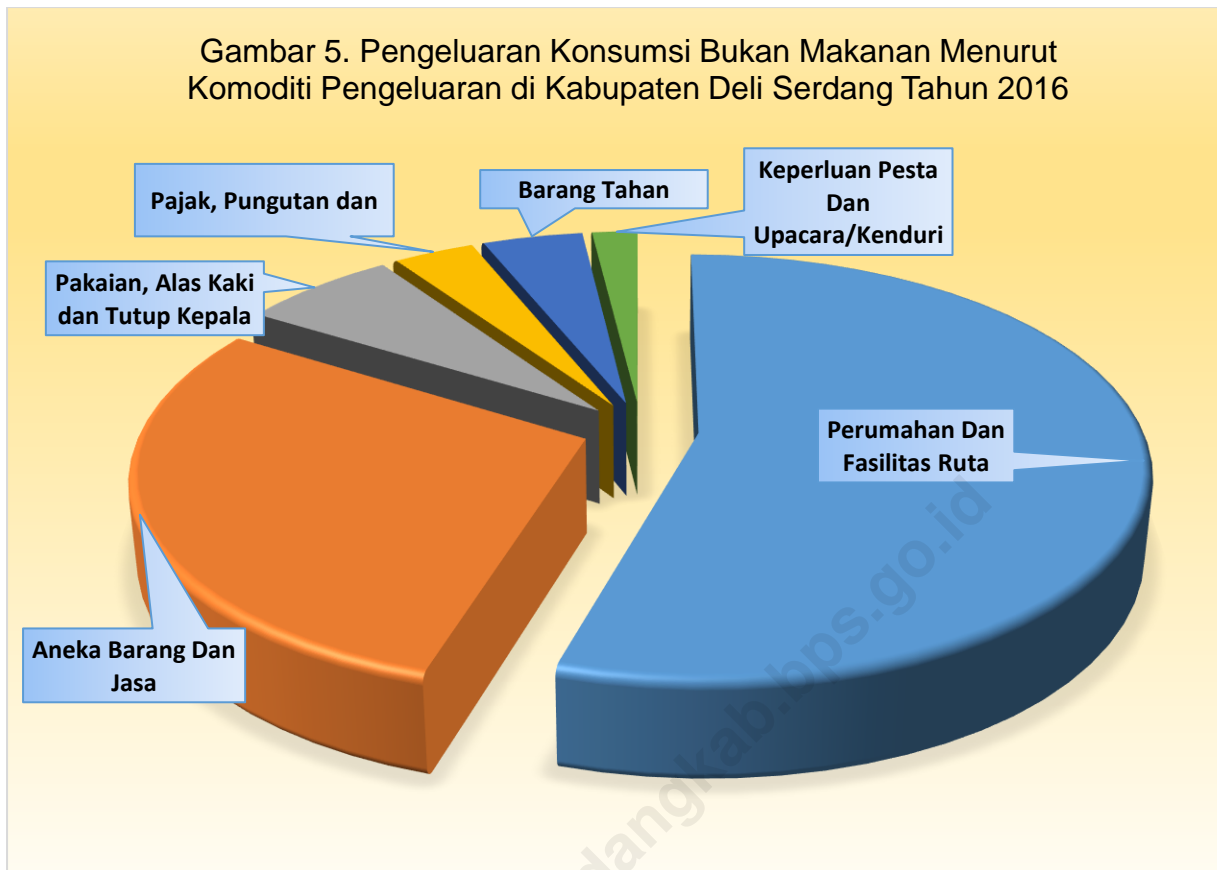
Selama tahun 2015 sampai 2016 persentase pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk kelompok bukan makanan mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2014 persentase pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk kelompok bukan makanan sebesar 48,14 persen turun menjadi 45,05 persen. Dari komoditi non makanan seluruhnya mengalami penurunan. Komoditi yang mengalami penurunan paling besar adalah perumahan dan fasilitas rumah yaitu mengalami penurunan sebesar 1,79 persen dan komoditi pajak, pungutan dan asuransi.





Jika dilihat pada tahun 2016 persentase pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dari seluruh komoditi bukan makanan (48,14 persen) terbesar adalah untuk komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu diatas 24 persen. Komoditi perumahan dan fasilitas rumah juga merupakan komoditi yang paling besar mengalami penurunan konsumsi pada tahun 2016. Sedangkan komoditi yang pengeluaran konsumsi per kapita per bulan paling kecil adalah keperluan pesta dan upacara (0,87 persen).

Gambar 5. Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Menurut Komoditi Pengeluaran di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016



Selain kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mengalami pengeluaran konsumsi terbesar pada tahun 2016. Komoditi lain yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah komoditi aneka barang dan jasa dalam hal ini yaitu biaya kesehatan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan dua komponen tersebut kinerja pemerintah apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak meskipun perlu penelitian lebih lanjut lagi berdasarkan data dan kondisi di masa lalu.

Pada tahun 2016 persentase pengeluaran konsumsi untuk kesehatan sebesar 1,48 persen. Konsumsi ini turun bila dibandingkan dengan tahun tahun 2015 yaitu sebelumnya sebesar 1,99 persen. Sementara itu untuk kelompok pendidikan pada tahun tahun 2015 sebesar 3,37 persen meningkat menjadi 3,39 persen pada tahun 2016.



Tabel A3. Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Aneka Barang dan Jasa di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2016

Jenis Komoditi	2015	2016
(1)	(4)	(5)
Biaya Kesehatan	1,99	1,48
Biaya Pendidikan	3,37	3,39
Aneka Barang, Transportasi dan Jasa	7,93	8,21

1.8. Pola Pergerakan Koefisien Gini Tahun 2013 -2016

Koefisien gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Koefisien gini Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2013 sampai 2016 cenderung mengalami perubahan yang relatif lebih kecil. Pada tahun 2013 koefisien gini berada di angka 0,2748, yang berarti bahwa Kabupaten Deli Serdang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Pada tahun 2015 koefisien gini turun naik menjadi 0,3159 yang berarti bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang meningkat sehingga berada di level kesenjangan sedang.

Seiring tahun berjalan koefisien gini bergerak turun kembali pada tahun 2016 menjadi 0,2823. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang berada di level rendah yang juga berarti bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang meningkat. Pada tahun yang sama tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang juga masih berada di bawah ketimpangan Provinsi Sumatera Utara.

Jika diurutkan menurut ketimpangan pendapatan yang rendah sampai yang tinggi dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Maka Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2013 sampai 2015 stabil berada di urutan 14 se-Sumatera Utara. Sedangkan pada tahun 2016 menempati urutan ke 21 se-Sumatera Utara.

Tabel A4. Peringkat Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2016

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	11	17	12	3
Mandailing Natal	9	15	19	14
Tapanuli Selatan	10	7	4	1
Tapanuli Tengah	20	21	24	29
Tapanuli Utara	23	20	25	27
Toba Samosir	21	32	23	24
Labuhan Batu	22	28	22	20
Asahan	15	12	16	11
Simalungun	18	29	33	23
Dairi	19	16	15	12
Karo	27	19	13	25
Deli Serdang	14	14	14	21
Langkat	16	22	18	9
Nias Selatan	1	1	7	2
Humbang Hasundutan	12	9	3	8
Pakpak Bharat	6	23	17	19
Samosir	13	30	29	15
Serdang Bedagai	4	8	11	16
Batubara	8	6	1	13
Padang Lawas Utara	3	3	6	10
Padang Lawas	26	10	10	17
Labuhan Batu Selatan	2	4	5	7
Labuhan Batu Utara	5	5	8	18
Nias Utara	7	13	9	6
Nias Barat	17	2	2	5
Sibolga	30	26	27	26
Tanjung Balai	33	31	20	30
Pematangsiantar	25	24	21	28
Tebing Tinggi	32	18	28	33
Medan	28	33	31	32
Binjai	24	11	26	4
Padangsidempuan	29	25	30	22
Gunung Sitoli	31	27	32	31

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara



1.9. Kriteria Bank Dunia

Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Selain indikator tersebut indikator lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian pendapatan adalah pengukuran tingkat kesenjangan distribusi pendapatan berdasarkan metode Bank Dunia.

Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk kedalam tiga kelompok, yaitu 40 persen berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen umumnya dikatakan kelompok ter kaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah.

Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata.

Tabel A5. Distribusi Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014– 2016 Menurut Kriteria Bank Dunia

Kriteria Bank Dunia	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
40 % Terbawah	23,46	22,25	22,74
40 % Menengah	39,17	36,23	39,82
20 % Atas	37,37	41,52	37,44

Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata.

Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 termasuk dalam daerah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan rendah, hal ini terlihat dari pendapatan yang dikuasai oleh 40 persen penduduk berpendapatan terbawah menguasai 22,74 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan teratas menguasai 37,44 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Deli Serdang.

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pergeseran yang nyata untuk rasio kelompok pendapatan Kabupaten Deli Serdang di dari tahun 2014-2016. Sekitar 77 persen kelompok pendapatan menengah dan tinggi menguasai distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Hal ini mengandung pengertian bahwa dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan oleh penerima pendapatan kelompok menengah dan tinggi.



LAMPIRAN

<http://deliserdangkab.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2016 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. N i a s	2 206,37	2 430,72	2 669,90	2 966,28
2. Mandailing Natal	7 874,04	8 758,76	9 598,75	10 661,04
3. Tapanuli Selatan	8 737,00	9 308,33	10 105,98	10 963,97
4. Tapanuli Tengah	5 914,05	6 516,46	7 140,28	7 849,65
5. Tapanuli Utara	4 984,01	5 383,65	5 828,15	6 300,29
6. Toba Samosir	4 735,41	5 176,74	5 633,72	6 140,47
7. Labuhan Batu	20 117,62	22 178,00	24 133,38	26 505,24
8. Asahan	22 064,96	24 302,72	26 541,79	29 189,60
9. Simalungun	23 232,51	25 338,49	27 237,46	30 191,08
10. D a i r i	5 711,56	6 268,08	6 823,16	7 433,42
11. K a r o	12 660,73	13 817,09	15 150,36	16 728,42
12. Deli Serdang	61 061,85	69 603,68	76 735,64	85 152,02
13. Langkat	25 423,58	27 769,54	30 351,77	33 949,47
14. Nias Selatan	3 898,78	4 305,08	4 742,91	5 194,79
15. Humbang Hasundutan	3 661,72	4 062,92	4 481,92	4 776,17
16. Pakpak Bharat	686,76	752,38	829,19	911,09
17. Samosir	2 546,78	2 823,07	3 143,81	3 442,98
18. Serdang Bedagai	16 744,97	18 457,29	20 166,08	22 113,82
19. Batubara	21 232,54	23 437,51	24 934,40	27 498,71
20. Padang Lawas Utara	6 756,27	7 477,28	8 244,71	9 077,41
21. Padang Lawas	6 631,30	7.288,06	7 902,93	8 807,42
22. Labuhan Batu Selatan	15 997,15	17 600,72	19 070,67	21 004,17
23. Labuhan Batu Utara	14 799,80	16 262,17	17 586,81	19 374,23
24. Nias Utara	2 089,32	2 303,44	2 517,21	2 777,63
25. Nias Barat	1 082,59	1 181,46	1 273,17	1 415,85
Kota				
71. Sibolga	3 057,12	3 426,51	3 827,17	4 262,85
72. Tanjungbalai	4 855,84	5 426,08	6 027,32	6 722,59
73. Pematangsiantar	8 487,29	9 555,19	10 565,48	11 579,29
74. Tebing Tinggi	3 514,00	3 934,67	4 304,35	4 729,18
75. M e d a n	131 604,64	147 683,86	164 628,28	186 049,04
76. B i n j a i	6 868,46	7 643,41	8 447,41	9 077,47
77. Padangsidempuan	3 616,69	3 997,56	4 424,34	4 913,28
78. Gunung Sitoli	2 871,84	3 210,03	3 573,44	4 038,52
Sumatera Utara	469 464,02	521 954,95	571 722,01	628 394,16

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2013-2016

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



Tabel 2. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2016

Jenis Komoditi	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	10,03	9,29	8,24	8,20
Umbi-Umbian	0,42	0,48	0,47	0,58
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	7,47	7,25	6,79	6,47
Daging	1,80	1,85	0,32	1,95
Telur dan Susu	3,32	3,49	3,59	3,60
Sayur-Sayuran	6,25	4,94	4,23	5,39
Kacang-Kacangan	1,23	1,22	0,88	0,88
Buah-buahan	2,32	2,58	1,89	2,04
Minyak dan Lemak	2,63	2,54	2,17	1,99
Bahan Minuman	2,13	1,75	1,68	1,69
Bumbu-Bumbuan	0,95	0,98	0,96	0,79
Konsumsi Lainnya	0,65	0,64	0,65	0,64
Makanan dan Minuman Jadi	10,24	9,89	11,36	11,95
Tembakau Dan Sirih	7,94	8,63	8,62	8,76
Makanan	57,40	55,54	51,86	54,95

Sumber : SUSENAS 2013-2016



Tabel 3. Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Bukan Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2016

Jenis Komoditi	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	16,41	16,68	26,42	24,64
Aneka Barang dan Jasa	18,20	19,65	13,29	13,08
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	3,29	3,52	3,04	2,99
Barang Tahan Lama	2,99	2,19	2,03	1,92
Pajak, Pungutan dan Asuransi	1,18	1,73	2,09	1,55
Keperluan Pesta Upacara/Kenduri	0,54	0,70	1,28	0,87
Bukan Makanan	42,60	44,46	48,14	45,05

Sumber : SUSENAS 2013-2016

Tabel 4. Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2016

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. N i a s	0,278	0,262	0,249	0,274
2. Mandailing Natal	0,276	0,279	0,287	0,270
3. Tapanuli Selatan	0,252	0,226	0,235	0,273
4. Tapanuli Tengah	0,308	0,303	0,359	0,306
5. Tapanuli Utara	0,300	0,305	0,356	0,309
6. Toba Samosir	0,344	0,302	0,328	0,308
7. Labuhan Batu	0,327	0,296	0,306	0,308
8. Asahan	0,263	0,277	0,274	0,283
9. Simalungun	0,329	0,356	0,319	0,296
10. D a i r i	0,277	0,274	0,279	0,301
11. K a r o	0,287	0,271	0,337	0,328
12. Deli Serdang	0,275	0,272	0,316	0,282
13. Langkat	0,308	0,279	0,267	0,283
14. Nias Selatan	0,207	0,235	0,241	0,214
15. Humbang Hasundutan	0,257	0,223	0,267	0,275
16. Pakpak Bharat	0,312	0,277	0,303	0,264
17. Samosir	0,331	0,318	0,287	0,276
18. Serdang Bedagai	0,254	0,260	0,291	0,254
19. Batubara	0,250	0,211	0,283	0,268
20. Padang Lawas Utara	0,215	0,234	0,269	0,253
21. Padang Lawas	0,257	0,253	0,297	0,326
22. Labuhan Batu Selatan	0,223	0,227	0,261	0,244
23. Labuhan Batu Utara	0,239	0,238	0,300	0,255
24. Nias Utara	0,264	0,252	0,261	0,266
25. Nias Barat	0,211	0,220	0,252	0,290
71. Sibolga	0,322	0,311	0,354	0,344
72. Tanjungbalai	0,335	0,290	0,365	0,373
73. Pematangsiantar	0,312	0,294	0,358	0,321
74. Tebing Tinggi	0,286	0,314	0,398	0,358
75. M e d a n	0,396	0,322	0,374	0,333
76. B i n j a i	0,260	0,308	0,252	0,316
77. Padangsidempuan	0,318	0,319	0,317	0,334
78. Gunung Sitoli	0,325	0,348	0,367	0,357
Sumatera Utara	0,334	0,311	0,336	0,319

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2013-2016



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

BPS-Statistics of Deli Serdang Regency

Jl. Karya Utama Komplek Pemkab Deli Serdang
Lubuk Pakam 20514 | Telp./Fax 061-7951326

Email: bps1212@bps.go.id | Website: <https://deliserdangkab.bps.go.id>

